

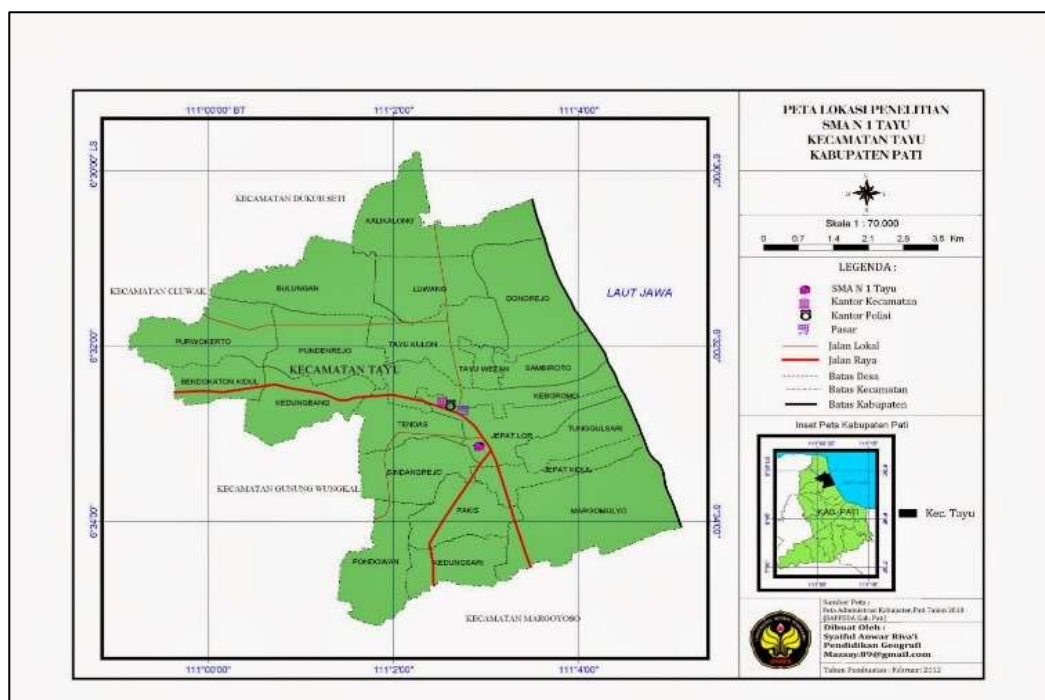
BAB II

GAMBARAN UMUM DAN SETTING PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis, Demografi dan Struktur Ekonomi Lokal

Posisi geografis Desa Pangro perlu ditempatkan sebagai konteks awal karena lokasi desa tidak hanya menjelaskan batas administratif, tetapi juga menjelaskan basis relasi sosial, mata pencaharian, dan pola mobilitas politik masyarakat. Secara administratif, Desa Pangro berada di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. 1 Peta Orientasi Desa Pangro, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati



Sumber : Kumpulanpeta.Blogspot (2013)

Sebagai desa yang terletak di kawasan pesisir utara Jawa tersebut, Desa Pangro terhubung dengan pusat aktivitas kecamatan, pasar lokal, serta ruang ekonomi agraris pesisir. Selain itu sebagai desa yang berada di wilayah pesisir utara Jawa tidak hanya menjadi ruang ekonomi agraris saja tetapi juga didominasi oleh aktivitas disektor perikanan, dan perdagangan kecil yang membuat tingkat ketergantungan ekonomi masyarakatnya pun relatif tinggi terhadap sektor informal.

Pola ekonomi di Desa Pangro lazim dijumpai di banyak desa pesisir utara Jawa, di mana pendapatan warga sering kali bersifat musiman, tidak selalu stabil, dan bergantung pada akses terhadap pekerjaan harian, relasi patron lokal, atau bantuan sosial. Ketidakpastian ekonomi tersebut membuka ruang bagi pertukaran politik berbasis manfaat langsung karena uang atau barang yang diberikan misalnya seperti pada saat menjelang pemilihan (PEMILU) dipersepsikan sebagai sumber daya yang konkret dan segera dapat digunakan, sehingga Desa Pangro menjadi arena sosial yang ditandai oleh mobilitas penduduk, hubungan patronase lokal, dan jaringan informal yang relatif kuat. Maka dari itu dalam penelitian ini, Desa Pangro tidak dipahami sekadar sebagai lokasi administrative semata, melainkan sebagai setting sosial politik tempat bekerjanya demokrasi desa melalui hubungan antara kandidat, botoh, pemilih, dan sumber daya desa.

Pada perspektif klientelisme, kerentanan ekonomi merupakan salah satu kondisi yang membuat politik uang menjadi efektif. Kitschelt dan Wilkinson (2007) menjelaskan bahwa klientelisme berkembang kuat ketika pemilih

menghadapi ketidakpastian ekonomi dan ketika akses terhadap sumber daya publik dapat dimediasi oleh aktor personal. Terlebih letak Desa Pangro tersebut menciptakan karakter sosial yang tidak sepenuhnya homogen agraris, melainkan memperlihatkan pertautan antara sektor pertanian, pekerjaan informal, perdagangan kecil, jasa, dan aktivitas yang terkait dengan ekonomi pesisir yang menciptakan keterbatasan dan ketidakpastian pendapatan warga. Hicken (2011) juga menegaskan bahwa klientelisme bukan semata perilaku menyimpang, melainkan bentuk pertukaran politik yang menjadi rasional ketika warga tidak percaya bahwa politik programatik akan menghasilkan manfaat yang pasti. Dengan demikian, penerimaan uang atau barang dalam pilkades bukan hanya tanda rendahnya kesadaran demokrasi, tetapi juga gejala struktural dari lemahnya perlindungan ekonomi dan terbatasnya akses warga terhadap sumber daya secara adil. Hal inilah yang memupuk subur eksistensi botoh dalam menanamkan pengaruhnya.

Secara metodologis, Desa Pangro tidak ditempatkan sebagai lokasi netral, tetapi sebagai arena sosial politik yang memiliki struktur geografis, ekonomi, dan jaringan sosial tertentu. Oleh karena itu, pembacaan atas praktik botoh dalam Pilkades Pangro perlu selalu dikaitkan dengan kondisi spasial desa, kedekatan antarwarga, relasi antar dukuh, akses terhadap pusat kecamatan, dan pola ketergantungan ekonomi yang membentuk perilaku politik warga (Granovetter, 1985; Putnam, 1993). Sebab aspek-aspek tersebut menjadi indikator penting yang perlu dibaca secara kritis sebagai kondisi yang memungkinkan botoh membangun pengaruh.

Masyarakat Desa Pangro memperlihatkan ciri komunitas desa yang relasi antar warganya masih relatif rapat, terlebih Desa Pangro terbagi ke dalam beberapa dukuh yang saling terhubung. Kuatnya intensitas interaksi dan jaringan sosial masyarakat ini juga membuat struktur sosial masyarakat Desa Pangro cenderung bersifat komunal dengan tingkat kohesi sosial yang tinggi. Relasi sosial yang tinggi tersebut tercermin dari basis hubungan kekerabatan, interaksi keagamaan, kelompok arisan, kelompok tani, jaringan pemuda, dan relasi ekonomi sehari-hari. Hubungan yang kuat antara kondisi sosial dan ekonomi tersebut menjadi faktor penting dalam memahami bagaimana pilihan politik dan praktik politik lokal berlangsung, sebab pilihan politik tidak pernah sepenuhnya individual, melainkan dipengaruhi oleh tekanan sosial, loyalitas kelompok, dan jaringan sosial khususnya dalam pemilihan kepala desa (Granovetter, 1985). Apalagi tindakan politik warga juga tidak terlepas dari jaringan sosial dan ekonomi sehingga kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa demokrasi desa tidak dapat dipahami melalui pendekatan individualistik, melainkan harus dilihat sebagai praktik sosial yang tertanam dalam struktur masyarakat setempat, tekanan jaringan, rasa sungkan, utang budi, serta ekspektasi atas manfaat material jangka pendek.

Kepadatan jaringan sosial di Desa Pangro memberikan dua implikasi penting bagi penelitian. Pertama, jaringan sosial memudahkan sirkulasi informasi politik karena isu tentang calon, kekuatan dukungan, dan strategi pemenangan menyebar cepat melalui ruang informal. Kedua, jaringan sosial juga memudahkan pengawasan informal terhadap perilaku politik warga.

Dalam komunitas kecil, pilihan politik memang bersifat rahasia secara prosedural, tetapi proses sebelum pemungutan suara sering kali berlangsung dalam ruang sosial yang saling mengamati. Kondisi ini membuat botoh memiliki peluang lebih besar untuk membaca peta dukungan, mengidentifikasi pemilih yang masih dapat dipengaruhi, dan menilai loyalitas pemilih berdasarkan percakapan sehari-hari.

Bentuk masyarakat yang komunal dan berjejaring rapat membuat Desa Pangro menjadi ruang politik yang mudah dimobilisasi, tetapi sekaligus rentan terhadap praktik klientelisme. Relasi sosial yang rapat tersebut justru menjadi infrastruktur politik informal yang besar. Modal sosial yang seharusnya menjadi dasar partisipasi dan kepercayaan publik dapat berubah fungsi menjadi sarana kontrol politik ketika digunakan oleh botoh atau jaringan pemenangan untuk mengikat pemilih. dalam hubungan klientelistik. Putnam (1993) memandang modal sosial sebagai sumber kepercayaan dan partisipasi kolektif, tetapi dalam konteks politik patronase, modal sosial dapat menutup ruang kritis, dan memperkuat dominasi aktor tertentu. Dalam kerangka ini, botoh tidak bekerja di luar masyarakat, melainkan bekerja melalui simpul-simpul sosial yang sudah ada di dalam masyarakat Desa Pangro. Oleh sebab itu, struktur sosial Desa Pangro perlu ditempatkan sebagai fondasi analitis untuk memahami mengapa praktik botoh dapat bertahan, bagaimana pengaruhnya menyebar, dan mengapa relasi kuasa pasca pilkades tidak dapat dilepaskan dari jaringan sosial yang terbentuk sebelum pemungutan suara.

2.2 Data Elektoral Pilkades 2021 dan Partisipasi Politik

Pemilihan kepala desa merupakan mekanisme demokrasi lokal yang diatur sebagai sarana pergantian kepemimpinan desa secara langsung oleh warga. Secara normatif, pilkades diselenggarakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta dijalankan melalui tahapan administratif seperti pembentukan panitia, pendataan pemilih, pendaftaran bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih (Permendagri Nomor 112 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Akan tetapi, dalam praktiknya pilkades tidak hanya merupakan prosedur administratif, melainkan juga arena kompetisi sosial yang sangat personal. Berbeda dengan pemilu nasional yang lebih luas dan impersonal, pilkades berlangsung dalam ruang sosial yang sempit, di mana kandidat, pemilih, keluarga, tokoh lokal, dan perantara politik saling mengenal. Kedekatan sosial ini membuat pilkades memiliki dua wajah. Di satu sisi, pilkades menjadi ruang partisipasi politik warga yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kedekatan tersebut membuka peluang bagi politik uang, patronase, tekanan sosial, serta peran broker informal yang bekerja melalui jaringan keluarga dan kelompok lokal (Aspinall & Rohman, 2017; Fitriyah, 2015).

Secara umum, pilkades adalah instrumen demokrasi desa untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pelayanan publik, pembangunan, dan sumber daya desa. Secara khusus, Pilkades Pangro menjadi arena penting karena kontestasi berlangsung dalam komunitas dengan jumlah pemilih relatif terbatas,

partisipasi tinggi, relasi sosial rapat, serta indikasi keterlibatan botoh sebagai aktor perantara. Dalam konteks Desa Pangro Pilkades tidak cukup dipahami dari angka perolehan suara, tetapi harus dianalisis dan ditinjau dari kondisi demografis Desa Pangro yang menjadi unsur penting dalam menjelaskan bekerjanya politik desa karena jumlah penduduk dan komposisi gender menentukan pola partisipasi politik serta tingkat kerentanan terhadap praktik pertukaran politik. Berikut data komposisi pemilih berdasarkan dokumen arsip khususnya dalam pemilihan kepala desa di Desa Pangro pada pelaksanaan Pilkades tahun 2021.

Tabel 2. 1 Komposisi Pemilih dan Partisipasi Pilkades Desa Pangro Tahun 2021

Aspek Demografis/Elektoral	Jumlah	Keterangan Analitis
Pemilih laki-laki	914 orang	Komposisi laki-laki relatif seimbang dengan pemilih perempuan sehingga mobilisasi politik tidak dapat hanya dibaca melalui satu kelompok gender.
Pemilih perempuan	904 orang	Keseimbangan gender membuka peluang partisipasi luas, tetapi preferensi politik tetap dipengaruhi jaringan keluarga dan relasi sosial lokal.
Total pemilih tetap	1.818 orang	Jumlah pemilih yang terbatas membuat setiap kantong dukungan keluarga, dukuh, dan kelompok sosial memiliki nilai elektoral tinggi.
Menggunakan hak pilih	1.631 orang	Menunjukkan partisipasi prosedural yang tinggi.
Tidak menggunakan hak pilih	187 orang	Kelompok tidak hadir tetap penting ditelusuri karena dapat menunjukkan apatisme, hambatan mobilitas, atau jarak terhadap kontestasi.
Tingkat partisipasi	89,7%	Partisipasi tinggi perlu dianalisis kritis: dapat mencerminkan kesadaran politik, tetapi juga dapat berkaitan dengan mobilisasi jaringan informal.

Sumber : Diolah dari Data Primer Peneliti

Jumlah pemilih yang memiliki hak pilih tercatat sebanyak 1.818 orang, terdiri atas 914 pemilih laki-laki dan 904 pemilih perempuan. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan gender yang relatif proporsional, sehingga secara normatif memberikan peluang bagi partisipasi politik yang inklusif dan arena politik desa tidak dapat dibaca hanya melalui dominasi salah satu kelompok jenis kelamin. Keseimbangan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan tersebut memperlihatkan bahwa strategi mobilisasi politik dalam Pilkades Pangro harus bekerja melalui ruang sosial rumah tangga, keluarga besar, kelompok perempuan, kelompok keagamaan, dan jaringan sosial sehari-hari yang melibatkan kedua kelompok secara bersamaan. Meskipun terkadang dalam praktiknya, distribusi gender tidak secara otomatis berimplikasi pada rasionalitas pilihan politik yang otonom, karena preferensi pemilih tetap sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial dan intervensi aktor informal seperti botoh.

Data pemilih dalam pilkades juga menunjukkan total 1.818 pemilih, sebanyak 1.631 orang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 187 orang tidak menggunakan hak pilih. Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 89,7%. Secara prosedural angka serta jumlah tersebut menunjukkan partisipasi politik yang sangat tinggi. Akan tetapi angka tersebut tidak boleh secara tunggal dimaknai sebagai kualitas demokrasi yang substantif. Jika dianalisis lebih kritis, angka partisipasi yang tinggi justru berpotensi dapat lahir dari dua kemungkinan yang berbeda yaitu kesadaran politik warga atau keberhasilan mobilisasi jaringan informal. Dalam perspektif *political brokerage*, partisipasi tinggi sering kali bukan hasil kesadaran politik yang

otonom, terlebih dalam konteks desa yang relasi sosialnya rapat seperti Desa Pangro tingkat kehadiran pemilih dapat lahir dari ajakan tokoh, tekanan lingkungan sosial, mobilisasi keluarga, dan distribusi insentif material yang dilakukan secara sistematis (Aspinall & Berenschot, 2019). Kondisi ini bukan sekadar latar belakang spasial, melainkan menjadi variabel penting dalam menjelaskan kerentanan struktural masyarakat Desa Pangro terhadap praktik politik transaksional. Oleh karena itu, partisipasi tinggi di Desa Pangro perlu dibaca sebagai gejala politik yang harus dianalisis lebih lanjut melalui relasi antara pemilih, kandidat, tim pemenangan, dan botoh sebagai broker politik lokal.

Pemilihan kepala desa di Desa Pangro pada tahun 2021 memperoleh hasil pemungutan suara yang menunjukkan bahwa calon nomor urut 01 yaitu Muh. Rais mendapat total 707 suara, sedangkan calon nomor urut 02 yakni Harto, memperoleh 900 suara dengan 21 suara tidak sah. Jika dihitung dari total suara sah sebanyak 1.607 suara, maka Harto memperoleh sekitar 56%, sementara Muh. Rais memperoleh sekitar 44%. Selisih 193 suara ini menunjukkan adanya keunggulan elektoral yang cukup signifikan, namun tetap dalam kategori kompetisi yang relatif ketat. Jika ditelaah lebih lanjut hasil tersebut cukup untuk menunjukkan keunggulan elektoral yang menentukan pemenang. Dalam kontestasi desa dengan jumlah pemilih terbatas, selisih semacam ini menjadi signifikan karena pergeseran dukungan pada beberapa kantong sosial dapat mengubah hasil akhir.

Secara teoritis, kemenangan tersebut dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan. Dalam perspektif pilihan rasional, pemilih diasumsikan memilih kandidat yang memberikan manfaat terbesar. Namun, pendekatan ini kurang memadai dalam menjelaskan konteks Desa Pangro, karena preferensi politik tidak sepenuhnya berbasis kalkulasi rasional individual. Sebaliknya, pendekatan klientelisme lebih relevan untuk menjelaskan fenomena ini, di mana pilihan politik dibentuk melalui pertukaran material, relasi personal, dan pengaruh jaringan sosial. Terlebih masyarakat Desa Pangro memiliki tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi. Kondisi masyarakat yang demikian menjadi mudah terlibat dalam relasi klientelistik karena kebutuhan material jangka pendek sering kali lebih dominan dibandingkan pertimbangan rasional berbasis program (Kitschelt & Wilkinson, 2007). Apalagi struktur sosial masyarakat Desa Pangro seperti yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan pola relasi yang erat dan berbasis kekerabatan sehingga akan dengan mudah untuk dipengaruhi keputusan dan pilihan politiknya dengan menggunakan aspek ekonomi sebagai celah.

Data yang ditampilkan memperlihatkan bahwa Pilkades di Desa Pangro memiliki karakter elektoral yang kompetitif sekaligus rentan terhadap intervensi broker. Tingginya partisipasi pemilih, keseimbangan komposisi laki-laki dan perempuan, serta selisih suara yang tidak terlalu jauh menciptakan arena di mana setiap jaringan sosial memiliki nilai politik yang besar. Botoh dapat memanfaatkan kondisi ini dengan memetakan keluarga besar, kelompok keagamaan, kelompok ekonomi, jaringan pemuda, dan pemilih mengambang.

Dalam perspektif Stokes, Dunning, Nazareno, dan Brusco (2013), broker bekerja efektif ketika mereka mampu mengidentifikasi pemilih sasaran, menyalurkan insentif secara selektif, dan memantau komitmen politik pemilih melalui jaringan sosial yang dekat. Oleh karena itu, angka partisipasi 89,7% perlu ditempatkan sebagai data awal untuk membaca intensitas mobilisasi politik, bukan sekadar capaian demokrasi prosedural. Pilkades memang memenuhi syarat formal karena warga hadir dan memilih secara langsung. Namun, penelitian ini berangkat dari pemikiran kritis bahwa kehadiran pemilih tidak selalu identik dengan otonomi politik. Dalam masyarakat yang memiliki relasi kekerabatan kuat dan ketergantungan ekonomi tinggi, partisipasi dapat dibentuk oleh ajakan tokoh, tekanan sosial, imbalan material, atau kombinasi dari ketiganya. Inilah yang menjadikan Desa Pangro sebagai kasus penting untuk menguji jarak antara demokrasi formal dan demokrasi substantif di tingkat desa.

2.3 Botoh sebagai Infrastruktur Informal Pemenangan

Fenomena botoh di Desa Pangro menunjukkan adanya paradoks dalam demokrasi desa. Di satu sisi, prosedur demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun di sisi lain, substansi demokrasi mengalami distorsi karena proses pemilihan didominasi oleh praktik transaksional. Maka demikian botoh perlu diposisikan sebagai bagian dari infrastruktur informal pemenangan, bukan sekadar aktor tambahan. Jika dilihat infrastruktur formal pilkades terdiri atas panitia pemilihan, daftar pemilih, tahapan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara, namun di balik

struktur formal tersebut terdapat infrastruktur informal berupa jaringan keluarga, tokoh kampung, penyandang dana, perantara suara, dan pengelola logistik politik. Botoh tidak selalu terlihat dalam dokumen resmi, tetapi dapat menentukan arah dukungan melalui percakapan, bantuan, ajakan, dan transaksi yang berlangsung di ruang sosial sehari-hari.

Peran botoh menjadi sangat krusial dalam Pilkades, terlebih botoh tidak lagi sekadar dipahami sebagai penjudi politik, melainkan sebagai broker yang memiliki kapasitas untuk menghubungkan kandidat dengan pemilih melalui jaringan informal. Di Desa Pangro, botoh berfungsi sebagai pengelola modal gelap, distributor insentif politik, sekaligus pengawas loyalitas pemilih. Secara konseptual, botoh di Pangro lebih tepat dipahami sebagai aktor dengan tiga fungsi sekaligus. Pertama, sebagai vote broker, botoh menghubungkan kandidat dengan pemilih melalui distribusi uang atau barang. Kedua, sebagai network broker, botoh mengaktifkan jaringan sosial yang sudah ada, seperti keluarga besar, kelompok pengajian, kelompok kerja, atau pertemanan lokal. Ketiga, sebagai power broker, botoh berpotensi mempertahankan pengaruh setelah kandidat menang melalui akses terhadap kepala desa, proyek, bantuan, atau keputusan tertentu. Klasifikasi ini penting agar penelitian tidak terjebak pada definisi sempit botoh sebagai penjudi politik semata. Peran ini juga menunjukkan bahwa proses demokrasi desa tidak sepenuhnya berlangsung dalam kerangka formal, melainkan sangat dipengaruhi oleh aktor informal yang bekerja di balik layar. Keberadaan botoh juga memperlihatkan bagaimana praktik klientelisme dan patronase beroperasi secara simultan. Dengan

demikian, hubungan antara kandidat, botoh, dan pemilih tidak bersifat temporer, melainkan berkelanjutan dan membentuk siklus kekuasaan yang sulit diputus.

Kekuatan botoh terletak pada kemampuannya membaca struktur sosial desa secara mikro. Dalam pilkades berskala kecil, informasi tentang siapa mendukung siapa, keluarga mana yang ragu, tokoh mana yang berpengaruh, dan kelompok mana yang dapat digeser menjadi modal politik yang sangat penting. Pengetahuan lokal seperti ini tidak dimiliki oleh aktor formal secara lengkap. Karena itu, kandidat membutuhkan botoh bukan hanya karena botoh memiliki uang, tetapi karena botoh memiliki pengetahuan sosial yang dapat dioperasionalkan menjadi strategi elektoral. Lebih jauh, praktik ini tidak berhenti pada proses elektoral, tetapi juga merambah pada tata kelola pemerintahan desa. Sebab Pilkades bukan hanya momen memilih kepala desa, tetapi pintu masuk menuju penguasaan otoritas administratif, akses anggaran, dan penentuan prioritas pembangunan. Pada titik ini, eksistensi botoh semakin banyak memperoleh legitimasi. Legitimasi botoh dapat bersumber dari kekayaan, keberanian, pengalaman dalam pilkades sebelumnya, kedekatan dengan kandidat, reputasi sebagai orang yang mampu mengurus masalah, atau posisi dalam jaringan sosial tertentu. Legitimasi ini bersifat informal, tetapi efektif. Scott (1976) menunjukkan bahwa dalam masyarakat agraris, hubungan patron-klien sering bertahan karena klien membutuhkan perlindungan, sementara patron memperoleh loyalitas. Dalam konteks pilkades di Desa

Pangro, botoh dapat memainkan fungsi patron lokal yang menyediakan manfaat jangka pendek sekaligus membangun kewajiban moral politik pemilih.

Sejak Undang-Undang Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada desa, posisi kepala desa menjadi semakin strategis karena berkaitan dengan perencanaan pembangunan, pengelolaan dana desa, pelayanan publik, dan distribusi program. Dalam konteks seperti ini, biaya politik yang dikeluarkan dalam pilkades dapat berubah menjadi beban politik setelah kandidat menang. Akibatnya, kebijakan desa berpotensi tidak sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pada pengembalian modal politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan. Oleh karena itu, dugaan keberlanjutan pengaruh botoh di Desa Pangro terlihat pada arena Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di mana warga telah memberikan kritik terhadap minimnya pelibatan dalam Musrenbangdes dan kualitas pembangunan desa. Selain itu distribusi program dan relasi antara pemerintah desa dengan kelompok pendukung juga menjadi indikator adanya pengaruh botoh dalam pelaksanaan pemerintahan. Apabila botoh atau jaringan pemenangan memiliki akses istimewa terhadap keputusan pembangunan, maka pilkades tidak lagi hanya berdampak pada hasil elektoral, tetapi juga pada kualitas tata kelola desa.

Hal ini menunjukkan bahwa Desa Pangro merupakan ruang politik yang kompleks, di mana demokrasi prosedural berjalan berdampingan dengan praktik informal yang terlembagakan secara sosial. Kompleksitas ini tidak hanya mencerminkan penyimpangan dari norma demokrasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana demokrasi desa bekerja secara nyata dalam konteks

sosial ekonomi tertentu melalui perantara botoh. Di sisi lain dari uraian yang telah dipaparkan juga menunjukkan bahwa di Desa Pangro tidak cukup hanya menanyakan apakah politik uang terjadi, tetapi harus menelusuri mengapa politik uang dapat diterima, siapa yang memediasi, kelompok mana yang paling rentan, dan bagaimana pertukaran itu dihubungkan dengan harapan atas akses sumber daya desa. Di titik ini, botoh harus dipahami sebagai aktor ekonomi politik yang mengonversi modal material dan jaringan sosial menjadi dukungan elektoral. Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa modal ekonomi, sosial, dan simbolik dapat saling dikonversi dalam arena tertentu. Dalam pilkades, botoh mengubah modal ekonomi menjadi pengaruh sosial, lalu mengubah pengaruh sosial menjadi suara politik.

Kabupaten Pati sendiri memiliki relevansi khusus karena pernah dikaji sebagai wilayah dengan praktik politik uang yang kuat dalam pilkada dan pilkades (Fitriyah, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Pangro tidak berdiri sebagai anomali tunggal, tetapi berada dalam ekosistem politik lokal yang lebih luas. Praktik botoh di Pangro perlu dibaca sebagai bagian dari budaya politik elektoral di wilayah yang telah lama mengenal perantara suara, taruhan politik, dan normalisasi pemberian uang. Namun, kekhasan Desa Pangro terletak pada bagaimana praktik itu bersinggungan dengan persoalan partisipasi pembangunan desa dan kritik warga terhadap pengelolaan sumber daya publik sebagaimana dicatat dalam laporan media lokal yang telah dirujuk sebelumnya.

Uraian mengenai botoh sebagai infrastruktur informal pemenangan menunjukkan bahwa posisi tersebut tidak dapat dijalankan oleh sembarang

individu. Kemampuan botoh dalam membaca peta dukungan, mengakses jaringan sosial, mengelola sumber daya, menjembatani kepentingan kandidat dengan pemilih, serta mempertahankan kepercayaan dalam jaringan politik lokal mensyaratkan adanya kapasitas dan sumber daya tertentu. Dengan demikian, eksistensi botoh bukan hanya ditentukan oleh keterlibatannya dalam proses pemenangan, tetapi juga oleh sejumlah prasyarat sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk legitimasi serta daya pengaruhnya di tengah masyarakat.

2.3.1 Karakteristik dan Prasyarat Sosial Politik Menjadi Botoh

Dalam menjelaskan botoh sebagai infrastruktur informal pemenangan, perlu ditegaskan bahwa tidak terdapat syarat formal atau ketentuan administratif untuk menjadi botoh. Botoh bukan jabatan resmi dalam struktur Pilkades, bukan pula organisasi yang mempunyai mekanisme keanggotaan baku. Status sebagai botoh terbentuk melalui pengakuan sosial dan efektivitas praktis. Seseorang disebut atau diperlakukan sebagai botoh ketika dirinya mempunyai kapasitas tertentu yang membuat kandidat, jaringan pemenangan, atau warga menilai dirinya mampu membaca kontestasi, menghubungkan aktor, mengelola sumber daya, serta memengaruhi arah dukungan. Dengan demikian, “syarat menjadi botoh” dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai seperangkat prasyarat sosial politik dan operasional yang terbentuk secara informal (Aspinall, 2014; Helmke & Levitsky, 2004).

Prasyarat pertama adalah reputasi dan legitimasi sosial. Botoh bekerja pada arena yang sangat mengandalkan kepercayaan. Oleh karena itu, seseorang yang

tidak dikenal, tidak dipercaya, atau tidak mempunyai reputasi tertentu akan sulit memperoleh informasi mengenai kecenderungan pemilih dan sulit pula masuk ke jaringan keluarga atau kelompok sosial yang relatif tertutup. Reputasi tersebut dapat berasal dari pengalaman dalam kontestasi sebelumnya, posisi sebagai tokoh kampung, kedekatan dengan kelompok tertentu, keberhasilan membantu warga, keberanian mengambil risiko, atau citra sebagai orang yang “paham medan”. Dalam politik desa, reputasi tidak harus identik dengan jabatan formal. Justru aktor informal sering efektif karena otoritasnya lahir dari hubungan sosial sehari-hari dan pengakuan komunitas (Aspinall & Rohman, 2017; Wuryani, Fitriyah, & Astuti, 2024).

Prasyarat kedua adalah kepemilikan jaringan sosial yang luas dan berlapis. Broker politik menjadi bernilai ketika ia mampu menjembatani kandidat dengan pemilih atau kelompok yang tidak dapat dijangkau langsung. Jaringan tersebut dapat berupa hubungan keluarga, pertemanan, kelompok pemuda, kelompok tani, pengajian, arisan, jaringan pekerjaan, pelaku usaha lokal, atau relasi lintas desa. Dalam konteks Pilkades, jaringan yang efektif bukan sekadar banyaknya kenalan, tetapi kemampuan mengidentifikasi simpul sosial yang mempunyai daya pengaruh. Stokes (2013) menjelaskan bahwa broker memiliki keunggulan karena mengetahui komunitas pada tingkat mikro dan dapat menargetkan individu yang strategis. Aspinall (2014) juga menunjukkan bahwa efektivitas broker di Indonesia sangat ditentukan oleh keterlekatan mereka pada jaringan sosial lokal

Prasyarat ketiga adalah pengetahuan lokal yang rinci mengenai peta sosial dan politik desa. Botoh harus mengetahui siapa yang mendukung siapa, keluarga mana yang mempunyai pengaruh, kelompok mana yang masih dapat digeser, siapa yang memiliki konflik personal, serta isu apa yang sensitif bagi lingkungan tertentu. Pengetahuan semacam ini berbeda dari survei formal karena diperoleh melalui percakapan, pengamatan, kunjungan, relasi pertemanan, dan pertukaran informasi antarsimpul jaringan. Pada skala desa, pengetahuan lokal dapat menjadi modal politik yang sangat bernilai karena jumlah pemilih terbatas dan relasi antarwarga rapat. Botoh yang mampu membaca peta dukungan secara mikro dapat membantu kandidat mengurangi ketidakpastian dan mengarahkan sumber daya kepada sasaran yang dianggap paling strategis (Stokes, 2013; Aspinall, 2014).

Prasyarat keempat adalah akses terhadap sumber daya ekonomi dan logistik. Tidak semua botoh harus menjadi pemodal utama, tetapi botoh yang efektif umumnya memiliki kemampuan menyediakan, menghimpun, menghubungkan, atau mengelola sumber daya yang dibutuhkan pemenangan. Sumber daya tersebut dapat berupa uang, kendaraan, konsumsi, dukungan kegiatan, biaya komunikasi, akses kepada penyandang dana, atau kemampuan menalangi kebutuhan tertentu. Dalam konteks politik lokal, modal ekonomi meningkatkan daya tawar botoh karena kandidat tidak hanya membutuhkan informasi, tetapi juga kemampuan untuk mengoperasionalkan strategi pemenangan. Kajian tentang politik uang di Indonesia menunjukkan bahwa broker sering menjadi penghubung antara sumber daya kandidat dan pemilih

sasaran, sehingga kapasitas logistik merupakan bagian penting dari fungsi perantara (Aspinall & Sukmajati, 2015; Muhtadi, 2019).

Prasyarat kelima adalah keterampilan mediasi, komunikasi, dan negosiasi. Botoh berada di antara aktor yang memiliki kepentingan berbeda: kandidat menginginkan kemenangan, pemilih mengharapkan perhatian atau manfaat, tokoh lokal ingin menjaga pengaruh, dan jaringan pemenangan membutuhkan koordinasi. Karena itu, botoh harus mampu menggunakan bahasa yang sesuai dengan konteks sosial, membaca sikap lawan bicara, membangun kepercayaan, menjaga kerahasiaan, serta melakukan negosiasi tanpa selalu menampilkan hubungan sebagai transaksi terbuka. Keterampilan tersebut membuat botoh dapat masuk melalui teman dekat, keluarga, atau figur yang dipercaya ketika pendekatan langsung tidak efektif. Dalam politik broker, kemampuan mediasi inilah yang membedakan aktor perantara dari pendukung biasa (Aspinall, 2014; Holland & Palmer Rubin, 2015).

Prasyarat keenam adalah keberanian mengambil risiko dan kemampuan menjaga diskresi. Jejak kultural istilah botoh berkaitan dengan dunia pertaruhan, sehingga unsur keberanian membaca risiko tetap relevan dalam transformasinya sebagai broker politik. Namun, dalam konteks kontemporer, keberanian saja tidak cukup. Botoh juga harus mampu menjaga kerahasiaan jaringan, membatasi keterbukaan informasi, dan menyesuaikan modus kerja dengan risiko hukum maupun sosial. Praktik politik informal cenderung bergerak melalui jalur yang sulit dideteksi ketika pengawasan formal

meningkat, sehingga kemampuan mengelola risiko menjadi bagian dari kapasitas botoh (Mares & Young, 2016; Abiyyu, 2020).

Prasyarat ketujuh adalah akses dan kepercayaan dari kandidat. Seseorang dapat memiliki jaringan dan modal, tetapi tidak otomatis menjadi bagian dari mesin pemenangan apabila tidak mempunyai hubungan dengan kandidat atau lingkaran inti. Botoh membutuhkan akses untuk memperoleh informasi mengenai strategi, kebutuhan, dan posisi kandidat, sementara kandidat membutuhkan keyakinan bahwa botoh dapat menjalankan tugas tanpa membocorkan informasi atau membelot. Hubungan ini bersifat dua arah dan tidak selalu sepenuhnya hierarkis. Broker yang menguasai jaringan penting justru dapat memiliki daya tawar terhadap kandidat karena kandidat bergantung pada informasi serta akses yang dimilikinya (Aspinall, 2014).

Prasyarat kedelapan adalah kemampuan memelihara resiprositas dan hubungan lintas waktu. Botoh yang hanya hadir satu kali untuk membagikan uang belum tentu memiliki kedudukan sosial yang kuat. Botoh yang lebih berpengaruh biasanya mampu mempertahankan hubungan dengan kandidat, tokoh, dan pemilih setelah momentum pemilihan selesai. Hubungan tersebut dapat dipelihara melalui komunikasi, bantuan sosial, pertemanan, konsultasi, atau keterlibatan dalam urusan komunitas. Kemampuan mempertahankan relasi membuat jaringan botoh tidak harus dibangun dari nol pada kontestasi berikutnya dan memperbesar kemungkinan terbentuknya klientelisme yang berjangka panjang (Hicken, 2011; Nichter, 2018).

Penjelasan prasyarat di atas tidak harus dimiliki setiap botoh dalam tingkat yang sama. Satu botoh dapat kuat pada modal ekonomi tetapi lemah pada jaringan, sementara botoh lain mungkin tidak memiliki modal besar tetapi mempunyai pengetahuan sosial dan legitimasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, botoh sebaiknya dipahami sebagai kategori fungsi, bukan tipe aktor yang seragam. Apsek yang menentukan adalah kemampuan menggabungkan beberapa sumber daya sehingga mampu berperan sebagai perantara antara kandidat, pemilih, dan jaringan sosial desa. Dalam kasus Desa Pangro, keterangan mengenai tim survei, pemetaan hampir sampai tingkat rumah, pengelolaan kelompok sosial, dukungan biaya, serta keberlanjutan hubungan dengan kandidat menunjukkan bahwa botoh yang diteliti memenuhi kombinasi prasyarat jaringan, pengetahuan lokal, modal, legitimasi, dan akses politik.

Dengan demikian, syarat sosial politik menjadi botoh dapat diringkas ke dalam lima modal pokok yakni modal reputasi, modal jaringan, modal informasi, modal ekonomi/logistik, dan modal relasional. Kelima modal tersebut dioperasionalkan melalui keterampilan mediasi, pengelolaan risiko, dan kemampuan mempertahankan hubungan. Kerangka ini memperjelas mengapa tidak setiap pendukung kandidat dapat disebut botoh. Tim sukses biasa dapat memiliki tugas kampanye, tetapi botoh memperoleh posisi khusus karena ia menguasai sumber daya yang dapat dikonversi menjadi pengaruh politik dan memiliki kemampuan untuk bekerja di wilayah informal yang tidak seluruhnya terlihat dalam struktur resmi Pilkades.

Tabel 2. 2 Karakteristik dan Prasyarat Sosial Politik Menjadi Botoh

Prasyarat	Makna analitis	Rujukan utama
Reputasi/legitimasi sosial	Diakui sebagai orang yang berpengalaman, dipercaya, atau “paham medan”.	Aspinall & Rohman 2017; Wuryani, 2024.
Jaringan sosial	Memiliki akses ke keluarga, tokoh, kelompok pemuda, tani, keagamaan, pekerjaan, atau jejaring lintas desa.	Aspinall, 2014; Stokes, 2013.
Pengetahuan lokal	Mampu membaca peta dukungan, pemilih ragu, tokoh berpengaruh, dan konflik sosial mikro.	Stokes, 2013; Aspinall, 2014.
Sumber daya ekonomi/logistik	Mampu menyediakan, menghimpun, atau menghubungkan sumber daya kemenangan.	Aspinall & Sukmajati, 2015; Muhtadi, 2019.
Keterampilan mediasi dan negosiasi	Mampu menjembatani kepentingan kandidat, pemilih, dan tokoh lokal.	Aspinall, 2014; Holland & Palmer Rubin, 2015.
Pengelolaan risiko/diskresi	Mampu bekerja pada wilayah informal dan mengurangi risiko sosial/hukum.	Mares & Young, 2016; Abiyyu, 2020.
Akses dan kepercayaan kandidat	Mempunyai jalur komunikasi dengan kandidat serta ruang untuk memengaruhi strategi.	Aspinall, 2014.
Pemeliharaan relasi	Mampu menjaga komunikasi dan resiprositas lintas waktu.	Hicken, 2011; Nichter, 2018.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

2.3.2 Level dan Struktur Botoh dalam Jaringan Politik Lokal

Botoh tidak dapat dipahami sebagai kategori aktor yang sepenuhnya homogen. Selain berbeda dalam kapasitas modal, jaringan, dan fungsi, botoh juga memperlihatkan perbedaan berdasarkan cakupan wilayah operasi serta posisi dalam jaringan pemenangan. Fitriyah dan Alfirdaus (2018: 194–196) menunjukkan bahwa perjalanan seorang botoh umumnya dimulai dari arena politik yang paling kecil, yaitu dusun, dukuh, dan desa melalui pemilihan kepala desa, kemudian sebagian berkembang ke arena yang lebih luas ketika pilkada langsung menjadi ruang baru bagi praktik tersebut. Uraian ini penting karena menunjukkan bahwa terdapat proses akumulasi pengalaman, reputasi, modal ekonomi, dan jaringan yang memungkinkan botoh bergerak dari skala lokal menuju skala supralokal.

Secara analitis, level botoh dapat dibaca melalui dua dimensi sekaligus. Pertama, dimensi teritorial, yaitu seberapa luas wilayah yang mampu dijangkau oleh botoh. Kedua, dimensi kapasitas, yaitu besarnya modal, kekuatan jaringan, kedekatan dengan kandidat, serta kemampuan mengorganisasi tim lapangan. Fitriyah dan Alfirdaus tidak merumuskan level tersebut sebagai klasifikasi formal yang kaku, tetapi deskripsi empirisnya memungkinkan penyusunan tingkatan analitis untuk menjelaskan perkembangan posisi botoh dari arena akar rumput menuju jaringan yang lebih luas.

Pada level dusun atau dukuh, botoh bekerja sangat dekat dengan kehidupan sosial sehari-hari. Kekuatan utamanya terletak pada pengetahuan rinci mengenai hubungan kekerabatan, tokoh yang didengar, konflik personal, serta

kecenderungan pilihan warga. Pada tahap ini, modal sosial dan informasi sering kali lebih penting daripada modal finansial yang besar. Botoh pada level akar rumput dapat bertindak sebagai pengumpul informasi, penghubung dengan figur lokal, atau bagian dari jaringan survei informal yang membantu membaca arah dukungan. Kedekatan sosial memungkinkan mereka mengakses informasi yang sulit diperoleh oleh kandidat maupun tim yang datang dari luar lingkungan tersebut. Pada level desa, peran botoh menjadi lebih jelas dalam konteks pilkades. Fitriyah dan Alfirdaus menjelaskan bahwa botoh pilkades dapat berperan sebagai pejudi maupun sebagai pemodal. Ketika bertindak sebagai pemodal, botoh membangun kesepakatan informal dengan kandidat, membantu menyediakan modal untuk politik uang, melakukan survei terhadap kekuatan calon, menggerakkan tim yang disebut ceker, serta ikut mengawal distribusi sumber daya pemenangan. Pada level ini, botoh tidak lagi hanya membaca kemungkinan menang atau kalah, tetapi ikut memengaruhi proses pembentukan hasil melalui pemetaan, mobilisasi, dan pengelolaan sumber daya.

Pada level kecamatan atau jaringan antar-desa, botoh mulai memperluas ruang operasinya melampaui satu desa. Fitriyah dan Alfirdaus mencatat bahwa botoh bermodal kecil dalam arena pilkada masih dapat beroperasi sebagai pejudi secara sporadis di tingkat desa atau paling luas kecamatan. Sementara itu, botoh yang memiliki pengalaman, jaringan, dan modal lebih besar mulai menghubungkan informasi dari beberapa desa, memperluas relasi antartim lokal, serta membangun jejaring yang tidak lagi bergantung pada satu

komunitas saja. Level ini dapat dipahami sebagai fase transisi dari botoh berbasis kedekatan lokal menuju botoh yang memiliki kapasitas koordinasi lintas wilayah.

Pada level kabupaten/kota dan skala yang lebih luas, botoh cenderung tampil sebagai pemodal besar atau bandar yang bekerja melalui grup. Dalam struktur tersebut terdapat botoh operator lapangan yang berhubungan langsung dengan kandidat, menampung modal dari anggota kelompok, mengendalikan ceker, membaca hasil survei, serta mengonsolidasikan strategi pemenangan. Di samping operator lapangan, terdapat pula pemodal yang hanya menitipkan modal tanpa turun langsung ke lapangan, sementara ceker berada pada lapisan operasional sebagai surveyor dan pengumpul informasi. Fitriyah dan Alfirdaus juga menunjukkan bahwa jaringan botoh besar dapat beroperasi lintas kabupaten bahkan lintas provinsi. Dengan demikian, semakin tinggi level botoh, semakin besar pula kebutuhan akan modal finansial, jaringan kepercayaan, kemampuan organisasi, dan akses langsung kepada kandidat.

Pembagian level tersebut tidak bermakna bahwa setiap botoh harus melewati tahapan secara linear atau bahwa botoh pada tingkat desa selalu memiliki pengaruh yang lebih kecil. Dalam politik desa, seorang botoh yang hanya beroperasi pada satu desa dapat memiliki daya pengaruh sangat kuat karena menguasai jaringan sosial dan pengetahuan mikro yang tidak dimiliki aktor dari luar. Oleh sebab itu, level teritorial perlu dibedakan dari level pengaruh. Botoh lokal dapat memiliki cakupan wilayah sempit tetapi daya pengaruh tinggi, sedangkan botoh bermodal besar dapat memiliki cakupan luas

tetapi tetap bergantung pada aktor akar rumput untuk memperoleh informasi dan menggerakkan pemilih.

Dalam konteks Desa Pangro, botoh yang menjadi fokus penelitian terutama bekerja pada level desa karena arena kontestasinya adalah pilkades. Namun, pola kerja yang ditemukan menunjukkan kapasitas yang melampaui figur penjudi lokal biasa. Kegiatan pemetaan dukungan hingga tingkat rumah tangga, pengaktifan jaringan kelompok sosial, dukungan pembiayaan atau logistik, serta keberlanjutan hubungan dengan kandidat menunjukkan bahwa botoh di Desa Pangro telah menjalankan fungsi sebagai vote broker dan network broker, bahkan memiliki potensi bergerak menjadi power broker setelah kandidat terpilih. Dengan demikian, penjelasan level botoh membantu memperjelas bahwa transformasi botoh bukan hanya perubahan istilah, tetapi juga perubahan skala operasi, sumber daya, struktur kerja, dan kedalaman pengaruh politik.

Tabel 2. 3 Level dan Cakupan Fungsi Botoh

Level Botoh	Karakteristik, cakupan, dan fungsi utama
Dusun	Beroperasi pada lingkungan mikro/akar rumput. Kekuatan utama terletak pada pengetahuan lokal, kedekatan sosial, dan reputasi. Fungsi dominannya ialah mengumpulkan informasi, mengenali tokoh berpengaruh, dan melakukan pemetaan awal dukungan.
Desa	Beroperasi dalam arena pilkades dengan dukungan jaringan desa, modal/logistik, dan ceker. Dapat berperan sebagai pejudi maupun pemodal; menjalankan survei, mobilisasi, politik uang, dan pengawalan dukungan.
Kecamatan/ antar desa	Menjangkau beberapa desa dan mengandalkan jaringan lintas desa serta pengalaman yang lebih luas. Fungsinya meliputi pertukaran informasi, koordinasi jaringan, serta pada kondisi tertentu spekulasi politik; dapat menjadi fase transisi menuju operasi berskala lebih besar.
Kabupaten/Kota dan Supralokal	Umumnya terkait dengan botoh besar/bandar dan operator lapangan. Mengandalkan modal besar, grup atau konsorsium, akses kepada kandidat, serta organisasi lapangan; berperan dalam pemodalan, survei, konsolidasi strategi, dan pengendalian operator serta ceker, bahkan dapat beroperasi lintas wilayah.

Sumber: Disusun Secara Analitis Berdasarkan Fitriyah & Alfirdaus (2018).

2.4 Penajaman Fokus dan Setting Penelitian

Praktik botoh dalam pemilihan kepala desa di Desa Pangro menjadi fokus utama dalam penelitian ini, akan tetapi perlu adanya pemetaan dan fokus kajian yang menekankan perhatian pada proses sebelum, selama, dan sesudah pemilihan. Fokus sebelum pemilihan diarahkan pada pemetaan dukungan, pembentukan jaringan, pengumpulan atau pengelolaan modal, serta distribusi insentif. Fokus selama pemilihan diarahkan pada mobilisasi pemilih, pengawasan loyalitas, dan cara botoh memastikan suara. Fokus setelah pemilihan diarahkan pada relasi balas jasa, akses terhadap sumber daya desa, dan pengaruh jaringan pemenangan terhadap tata kelola. Dengan demikian, Politik Uang di Desa Pangro harus diarahkan pada hubungan antara tiga arena yakni arena elektoral, arena sosial, dan arena pemerintahan desa. Arena elektoral menjelaskan bagaimana suara dimobilisasi. Arena sosial menjelaskan bagaimana jaringan kekerabatan dan otoritas informal bekerja. Arena pemerintahan desa menjelaskan bagaimana kemenangan diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi dasar untuk membaca botoh sebagai aktor yang tidak hanya memengaruhi hasil pilkades, tetapi juga berpotensi membentuk relasi kuasa pasca pilkades.

Penelitian ini tidak menempatkan seluruh warga Desa Pangro sebagai pelaku politik uang, karena generalisasi semacam itu akan menyederhanakan realitas sosial. Sebaliknya, penelitian ini melihat warga sebagai aktor yang berada dalam struktur sosial dan ekonomi tertentu. Sebagian warga mungkin

menerima uang karena kebutuhan ekonomi, sebagian karena tekanan relasi, sebagian karena menganggap pemberian sebagai kewajiban, dan sebagian lain mungkin menolak. Perbedaan respons inilah yang perlu digali melalui wawancara mendalam agar penelitian tidak hanya menghasilkan narasi moralistik, tetapi analisis yang empiris dan kritis. Perlu diketahui juga bahwa penelitian ini tidak bertujuan membuktikan kesalahan hukum individu tertentu, melainkan menjelaskan mekanisme sosial politik yang memungkinkan botoh bertahan. Dengan batasan tersebut, istilah politik modal gelap digunakan untuk menunjukkan sumber daya kemenangan yang tidak transparan, tidak tercatat secara formal, dan bekerja melalui jaringan informal. Istilah ini penting karena problem utama bukan hanya transaksi uang, tetapi hubungan antara modal, jaringan, dan akses kekuasaan.

Dengan demikian, botoh di Pangro akan dianalisis sebagai operator yang menghubungkan modal gelap dengan perilaku memilih dan distribusi kuasa desa. Jika dibandingkan dengan sejumlah studi terdahulu lebih banyak menempatkan botoh sebagai aktor elektoral, sedangkan pada penelitian ini lebih mengerucutkan analisis dengan melihat botoh sebagai aktor yang berpotensi memediasi akses terhadap sumber daya desa setelah pemilihan selesai. Maka dari itu kontribusi empiris penelitian ini terletak pada upaya membaca demokrasi desa secara lebih utuh bukan hanya dari suara yang diberikan di bilik pemilihan, tetapi juga dari relasi kuasa yang terbentuk setelah kemenangan.